



Masyarakat Diminta Manfaatkan *Booster*

Vaksinasi *booster* di Kota Yogyakarta sudah cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

■ SILVY DIAN SETIAWAN

YOGYAKARTA — Pemerintah Daerah (Pemda) DIY meminta agar masyarakat memanfaatkan layanan vaksinasi *booster*. Pasalnya, terdapat informasi bahwa pada 2023 mendatang direncanakan layanan vaksinasi akan berbayar untuk kelompok non penerima bantuan iuran (non-PBI) usai tidak lagi dialokasikan anggaran khusus Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Sekda DIY, Kadarmanta Baskara Aji mengatakan, pihaknya terus menggenjot vaksinasi Covid-19, terutama *booster* di DIY. Sebab, saat ini capaian *booster* di DIY baru mencapai sekitar 36 persen. "Saya kira masyarakat perlu memanfaatkan, mumpung kesempatan ini masih gratis," kata Aji belum lama ini.

Aji menyebut, ketersediaan vaksin Covid-19 di DIY masih sangat mencukupi. Bahkan, sentra vaksinasi untuk *booster* juga terus dibuka

di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) maupun di tingkat kecamatan dan kelurahan di DIY.

"Kita sekarang hanya membuka sentra-sentra saja, orang datang untuk vaksinasi. Karena sekarang kita capaian tinggal *booster* saja (untuk digenjut), yang reguler (dosis pertama dan dosis kedua) sudah," ujar Aji.

Untuk itu, ia mengimbau agar masyarakat mengakses layanan *booster* di fasyankes terdekat. "Vaksin masih tersedia di tingkat (pelayanan) kesehatan dengan sangat banyak, maka ayo berbondong-bondong segera selesaikan (*booster*) sebelum berbayar," jelasnya.

Sementara itu, vaksinasi *booster* di Kota Yogyakarta sudah cukup tinggi dibandingkan dengan kabupaten lainnya di DIY. Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta menyebut, capaian vaksinasi *booster* sudah di atas 90 persen. "Untuk *booster* kita sudah 93 persen," kata Kepala Dinkes Kota Yogyakarta, Emma

ma Rahmi Aryani kepada *Republika*.

Bahkan, *booster* kedua untuk tenaga kesehatan juga sudah mulai dilakukan. Hingga saat ini, Emma menyebut, capaian vaksinasi *booster* kedua untuk nakes di Kota Yogyakarta sudah mencapai 45,44 persen. "Sudah ada 4.420 SDM (SDM kesehatan) yang di-*booster* kedua," ujar Emma.

Emma menyebut, ketersediaan vaksin di Kota Yogyakarta sangat mencukupi. Baik itu untuk masyarakat umum maupun untuk *booster* kedua bagi nakes ini. Terlebih, untuk nakes juga tidak harus menggunakan jenis vaksin Moderna. Namun, *booster* kedua nakes ini juga dapat menggunakan jenis vaksin Pfizer.

"Ada ketentuan baru bisa juga pakai Pfizer, tidak harus Moderna, nanti kita minta lagi ke (Dinkes) DIY untuk penambahan (ketersediaan vaksin). Karena memang ED-nya (*expired date*-nya) pendek-pendek, jadi kita ambilnya tidak banyak, nanti khawatir kalau tidak terserap jadi tanggungannya Kota Yoga, jadi catatan kebanyakan (vaksin yang sudah) ED," lanjut Emma.

Ketua Percepatan Vaksinasi DIY, Sumadi menyebut sebelumnya bah-

wa percepatan pemberian *booster* untuk masyarakat umum terus dilakukan. Namun, capaian *booster* di DIY masih rendah jika dibandingkan dengan dosis pertama dan kedua.

Menurut Sumadi, percepatan ini ini terkendala salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengakses layanan *booster*. Untuk itu, katanya, masih perlu upaya lebih untuk edukasi dan sosialisasi terkait *booster* ini kepada masyarakat. "Kendalanya, masyarakat kita perlu didukasi (lebih), mereka baru melakukan *booster* kalau memang sudah ada keterpaksaan," kata Sumadi yang juga Penjabat (Pj) Wali Kota Yogyakarta tersebut saat dikonfirmasi.

Sumadi menuturkan, masyarakat yang mengakses *booster* rata-rata, dikarenakan adanya kebijakan yang mewajibkan *booster*. Seperti kebijakan untuk pelaku perjalanan luar daerah atau luar negeri yang mengharuskan harus divaksin *booster*.

"Misalnya ada tuntutan untuk naik pesawat atau mengakses pelayanan publik, (karena) ketentuan-ketentuan itu mereka baru mau (di-*booster*). Mereka menganggap cukup dua kali (vaksin), *booster* belum perlu," ujar Sumadi. ■ *ed: fernan rahadi*

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005